

TAJUK RENCANA

Aroma Politik Penegakan Hukum

AROMApolitisasi dalam pene-gakan hukum sulit dihindarkan ketika penyidik Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) meme-riksa Muhaemin Iskandar (Cak Imin) yang kini menjadi bakal calon wakil presiden mendam-pingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Cak Imin diperiksa penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan ko-rupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker RI.

Cak Imin diperiksa sehubun-gan jabatannya saat itu sebagai Menaker yang sekaligus selaku pengguna anggaran yang menyetujui adanya proyek peng-aadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker. Sejauh ini yang ber-sangkutan baru diperiksa seputar pengetahuannya tentang awal mula kebijakan pengadaan sis-tem proteksi TKI.

Cak Imin sendiri telah menya-takan siap membantu KPK mengungkap kasus tersebut. Namun, sampai saat ini sejauh mana keterlibatan Cak Imin belum jelas. Yang menarik tentu mengapa pemeriksaan terhadap Cak Imin dilakukan KPK saat ini, padahal kasusnya mencuat sejak tahun 2012, yang artinya sudah lewat sepuluh tahun lalu ? Inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi di masyarakat, terma-suk para politisi dan pengamat hukum.

Secara aturan memang tidak ada ketentuan batas waktu ka-pan pemeriksaan terhadap peja-bat negara atau mantan pejabat negara harus dilakukan. Sepan-jang kasusnya belum kedalu-warsa, maka pemeriksaan itu bisa dilakukan. Namun kali ini momentumnya bertepatan de-ngan semaraknya pengajuan kandidat cawapres, sehingga memunculkan berbagai per-tanyaan publik, yakni adakah mo-tif politik di balik pemeriksaan Cak Imin.

Menkopolkukam Moh Mahfud MD meyakini tidak ada motif poli-tik di balik pemeriksaan Caki Imin, melainkan murni pene-gakan hukum. Tentu yang paling tahu adalah KPK selaku lembaga yang diberi otoritas untuk memeriksa seseorang guna mengungkap kasus korupsi. Dalam kaitan itu, selayaknya Ketua KPK Firli Bahuri menje-laskan kepada publik menyang-kut pemeriksaan terhadap Cak Imin. Artinya, tidak cukup penje-lasan itu hanya melalui Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Kita bisa memprediksi jawaban yang bakal disampaikan bersifat normatif bahwa semua itu demi penegakan hukum. Terlebih, saat ini KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus pengadaan sis-tem proteksi tenaga kerja Indone-sia. Persoalannya, apakah pen-gungkapan itu membutuhkan waktu hingga sepuluh tahun lebih, sementara orang-orang yang diperiksa masih berada di Indonesia ? Kita mendorong KPK memberi penjelasan secara transparan, termasuk kesulitan yang dihadapi selama ini sehing-ga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tentu kasusnya akan berbeda dengan Harun Masiku yang hing-ga sekarang belum jelas keber-aadaannya, sehingga kasusnya terkatung-katung. Dari situlah kita ingin melihat profesionalitas KPK dalam mengungkap kasus, de-ngan tetap menegakkan prinsip equality before the law, atau per-samaan orang di muka hukum, bukan diskriminatif atau tebang pil-ih. Di tahun politik ini KPK benar-benar sedang diuji indepen-densinya, apakah bisa on the track dalam mengungkap kasus, atau sebaliknya tak berdaya ketika diintervensi kekuatan politik. □d

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
di lampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Seminar Gratis untuk (Calon) UMKM
KAMI ingin mengundang ba-pak/ibu hadir dalam seminar ‘Membangun Bisnis Baru dan Bagaimana Mengembangkan Usaha yang Sudah Jalan di kala-ngan UMKM di wilayah Yog-yakarta’. Seminar gratis untuk umum ini diselenggarakan Se-lasa 12 September 2023 pukul 14.00 - 17.00. Kegiatan diseleng-garkan di Artech Space Co-working Jl Sagan Kidul N0 14. Seminar ini merupakan bagian dari roadshow di pelba-gai kota di Indonesia yang dise-lenggarakan Ciputra Enter-preneurs Club. Kegiatan meru-pakan program berjalan dari Ciputra Group untuk pengem-bangan UMKM di wilayah Yogyakarta’. Seminar gratis untuk umum ini diselenggarakan Se-lasa 12 September 2023 pukul 14.00 - 17.00. Kegiatan diseleng-garkan di Artech Space Co-working Jl Sagan Kidul N0 14. Seminar ini merupakan bagian dari roadshow di pelba-

gai kota di Indonesia yang dise-lenggarakan Ciputra Enter-preneurs Club. Kegiatan meru-pakan program berjalan dari Ciputra Group untuk pengem-bangan UMKM di wilayah Yogyakarta’. Seminar gratis untuk umum ini diselenggarakan Se-lasa 12 September 2023 pukul 14.00 - 17.00. Kegiatan diseleng-garkan di Artech Space Co-working Jl Sagan Kidul N0 14. Seminar ini merupakan bagian dari roadshow di pelba-

‘Kesadaran’ Ber-cagar Budaya di Masyarakat
KINI terdapat ironi di masya-rakat. Di satu sisi terjadi pengempuran terhadap warisan budaya bahkan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Entah karena alih fungsi kepemilikan ataupun desakan ekonomis. Seringkali terdengar kabar kemudian pe-merintah ‘kecolongan’ karena cagar budaya itu tiba-tiba telah hancur atau hilang. Di sisi lain, melihat ada ma-

Pemilu Sebagai Agenda Warga

Laila Kholid Alfirdaus

Penulis mengajukan pendekatan pem-bacaan alternatif yang menekankan pemilu sebagai agendanya warga negara. Lebih khusus, penulis berargumen bah-wa pengalaman warga menanggung be-ban administratif dalam interaksinya dengan kebijakan publik bisa menjadi cara baca alternatif bagi warga dalam memahami pemilu dan Pilpres 2024. Dalam bukunya *Administrative Burden: Policymaking by Other Means* (2018),



KR-JOKO SANTOSO

profesor politik Pamela Herd dan Donald Moynihan dari Georgetown University AS, menggambarkan tiga jenis beban : belajar (*learning*), kepatuhan (*compli-ance,P>*) dan psikologis (*psychology*) yang ditanggung warga negara saat berinter-aksi dengan negara dalam upayanya memperoleh layanan sosial dan publik. Konsep ini sangat membantu dalam memahami pengalaman warga negara dan tindakan pemerintah melalui kebi-jakan publik. Sebagai contoh, dalam ap-likasi BPJS Kesehatan. Kurangan sin-ergi antara BPJS, instansi sektoral di tingkat daerah, dan pemerintah desa da-lam memberikan literasi tentang pen-

Sastra Jawa di Media Massa

Warisman

ni tetap terbit teratur. Di Jakarta pernah terbit Kunthi dan Parikesit yang berupa majalah. Keduanya kini sudah al-marhum. Tahun 2004 Majalah Parikesit terbit lagi dengan format lebih kecil, na-mun tidak berumur lama. Dinas Kebudayaan DIY kini mener-bitkan majalah ‘Sempulur’. Dinas Kebudayaan Sleman menerbitkan ma-jalah ‘Memetri’, Dinas Kebudayaan Bantul menerbitkan majalah ‘Mentaok’. Balai Bahasa Yogyakarta menerbitkan ‘Pagagan’. Komunitas pengarang sastra Jawa di DIY juga menerbitkan majalah bahasa Jawa. Pasbuja Kawi Merapi Sleman menerbitkan Majalah Belik, sedang komunitas Presaja Gunungkidul menerbitkan majalah Gumregah. Kemudian Balai Bahasa Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mener-bitkan majalah Bahasa Jawa.

Dua Bahasa

Tahun 2003 Majalah Mekar Sari masuk menjadi salah satu rubrik di SKH Kedaulatan Rakyat. Demikian pula KMD Kandha Raharja. Kalau Mekar Sari tetap menggunakan Bahasa Jawa, Kandha Raharja berubah menjadi berbahasa Indonesia. Sebetulnya ada nilai tambah Mekar Sari menjadi rubrik di KR. Lebih banyak orang yang melihat karena menjadi satu dengan KR. Ketika membuka KR pembaca menemukan rubrik Mekar Sari seminggu sekali. Diawali satu halaman, kini rubrik Mekar Sari hanya sete-ngah halaman, tetapi sastranya tetap ada. Cerkak geguritan dan macapat. Sebetulnya mengupas

bahasa dan budaya Jawa malah akan lebih baik menggunakan Bahasa Indonesia. Dengan begitu, orang yang tidak tahu bahasa Jawa bisa mengikutinya. Budaya Jawa bisa lebih luas dikenal, ti-dak hanya di lingkungan orang Jawa saja. Seperti buku hasil penelitian, menggu-nakan bahasa Indonesia, meskipun yang dibahas tentang bahasa dan sastra Jawa. Buku Antologi Biografi Pengarang Sastra Jawa Modern juga menggunakan bahasa Indonesia. Di KR ada beberapa rubrik yang bisa mewadahi tulisan Budaya Jawa. Penggu-naan Bahasa Jawa hanya untuk tulisan terapan sastra seperti *cerkak*, *geguritan* dan *macapat*. Kupasan dan berita Budaya Jawa menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan dua bahasa oleh media mas-sa memungkinkan sastra Jawa dikenal lebih luas di masyarakat. □d *) *Warisman*, wartawan SKH Kedaulatan Rakyat.

Pojok KR

Sejumlah lahan terdampak Tol-YIA tak diketahui pemiliknya.
-- Inilah pentingnya inventarisasi kepemilikan tanah.

Golkar izinkan Ridwan Kamil Bacawapres Ganjar.
-- Semua peluang diijaki.

Identitas kependudukan berbasis digi-tal, aktivasi rendah.
-- Keamanan data pribadi juga pen-ting.

Beraba

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjianti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-gungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP